



Review / Ulasan

## Mewujudkan Visi, Misi dan Program Aksi Pemerintahan Baru Bidang Lingkungan Hidup

Tasdiyanto Rohadi

Widyaiswara Pusdiklat Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kawasan Puspiptek Serpong, Gd. 210, Jl. Raya Puspiptek Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

(Diterima 10 November 2014; Diterbitkan 28 November 2014)

**Abstract:** Tulisan ini mengupas secara singkat tentang rencana strategis dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang baru terbentuk dalam bidang lingkungan hidup yang meliputi visi, misi dan program aksi untuk periode 2014 – 2019. Pemerintahan yang baru ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Banyak hal yang akan menjadi prioritas pemerintah khususnya dalam bidang tata ruang serta bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Tulisan ini juga mengupas mengenai perlunya pembenahan atau review terhadap program-program yang selama ini telah berjalan (existing) seperti Kalpataru, Adiwiyata, Adipura, Proper. Pendekatan insentif dan disinsentif atau *model stick and carrot* perlu dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan keahlian/keterampilan.

**Keywords:** rencana strategis, lingkungan hidup, Pemerintah Jokowi-JK.

Corresponding author: Tasdiyanto Rohadi, E-mail: [tasdiyantorohadi@yahoo.com](mailto:tasdiyantorohadi@yahoo.com), Tel. +6282147328072.

### Latar Belakang

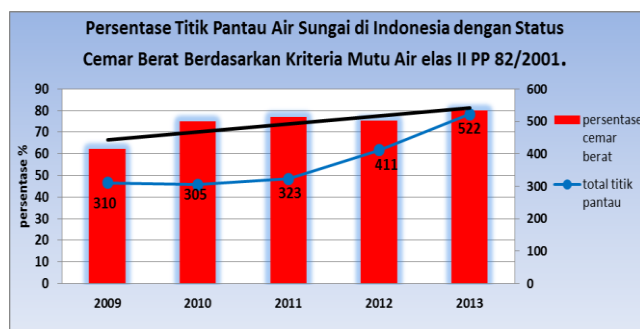
"Jalan perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian" menjadi komitmen Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi - JK) dalam membangun Bangsa Indonesia 2014 - 2019. Perubahan tersebut diawali dengan konstruksi Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi - Jusuf Kalla 2014.

Salah satu perhatian Bapak Joko Widodo - Jusuf Kalla adalah di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, yang didasari atas dijumpainya kelemahan sendi perekonomian bangsa:

*"Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan ..."*

Kondisi tersebut tidak bisa dipungkiri, dan telah menjadi fakta di Indonesia. Bahkan, kualitas hidup masyarakat Indonesia masih terbebani dengan kualitas lingkungan hidup yang tidak kunjung bertambah baik. Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di berbagai tempat kian meningkat.

*Paper ini dipresentasikan pada Lokakarya Regional Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten tanggal 10 – 11 November 2014 di Patra Jasa Anyer Beach Resort, Serang --- 10*



Sumber: Sarpedal KLH, 2014

**Gambar 1.** Status Mutu Kualitas Air Sungai 2009 -2013.

Gambar tersebut di atas menunjukkan penurunan kualitas lingkungan hidup pada kurun waktu lima tahun terakhir (2009 - 2013), terutama pada aspek mutu kualitas air yang pencemarannya semakin meningkat. Penurunan kualitas air sungai umumnya disebabkan oleh limbah organik sumber domestik dan industri, yang diindikasikan tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya kadar oksigen di perairan. Selain itu dominasi keberadaan bakteri fecal coli dan total coliform dari limbah padat manusia dan hewan, merupakan pencemar dominan sungai-sungai di wilayah Jawa atau wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.<sup>1</sup>

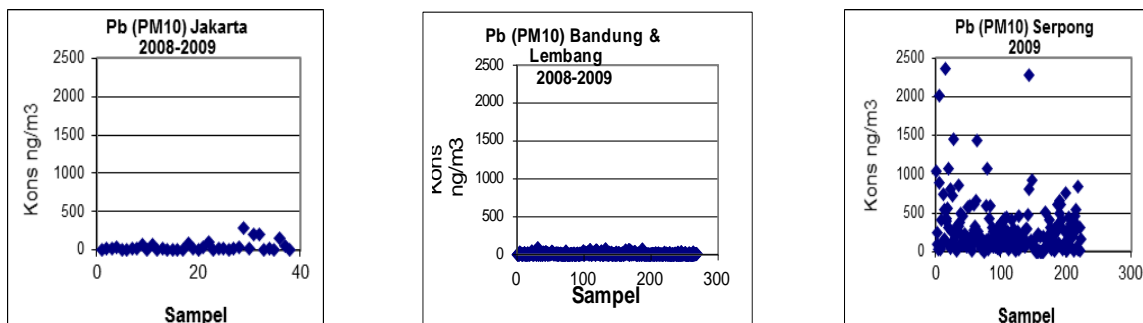
Kualitas udara kota-kota di Indonesia juga semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan pengukuran Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, KLH, pada tahun 2011 di 243 kota di Indonesia teridentifikasi bahwa kandungan pencemar Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ), dan Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) yang umumnya masih di bawah baku mutu. Namun di beberapa kota, terutama Jakarta, Cilegon, Pekanbaru dan Jambi memiliki konsentrasi  $\text{NO}_2$  melebihi baku udara ambient ( $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) di titik pantau transportasi. Bahkan untuk kandungan logam berat di udara Jakarta dan sekitarnya lebih mengkhawatirkan. Pemantauan pada tahun 2008-2009 telah ditemukan konsentrasi Pb di Serpong-Tangerang mencapai 100 -1000 kali lebih tinggi dibanding dengan konsentrasi Pb di Bandung dan Jakarta, yang mendekati  $2500 \text{ ng}/\text{m}^3$ . Padahal, baku mutu Pb berdasarkan penetapan Pemerintah adalah  $2000 \text{ ng}/\text{m}^3$ , dan di jika di Amerika hanya  $250 \text{ ng}/\text{m}^3$ . Hal ini diduga bersumber diantaranya dari kegiatan pembakaran aki bekas di daerah Parung Panjang.<sup>2</sup>

Pencemaran lingkungan di Indonesia, diperparah dengan berbagai kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan berbagai bencana, terutama banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Bencana kekeringan dan kebakaran hutan ini banyak terjadi di daerah luar Jawa. Di Sumatera kebakaran hutan mencapai luasan 850 hektar pada tahun 2014 ini. Sedangkan bencana banjir kerap terjadi di Jawa, diantaranya adalah di DKI Jakarta. Menurut data dari BPBD DKI Jakarta pada tahun 2014 ini masih sekitar 17,40 % wilayahnya menjadi langganan banjir, yang meliputi 89 kelurahan. Namun demikian, diyakini bahwa banjir di Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia tersebut, selain dipengaruhi oleh perilaku masyarakatnya ditambah dengan fenomena perubahan iklim global, juga berawal dari tata ruang yang belum terintegrasi dengan baik.

<sup>1</sup> Laporan hasil pemantauan kualitas media air menjadi lampiran tulisan ini.

<sup>2</sup> Laporan hasil pemantauan kualitas udara menjadi lampiran tulisan ini.

Akar masalah tersebut dapat terjawab dalam visi, misi dan program aksi pasangan Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pendekatan aspek tata ruang dengan lingkungan hidup menjadi rangkaian alur penyelesaian masalah lingkungan hidup yang efektif dan berorientasi dari hulu hingga hilir.



Sumber: Pusarpedal, KLH, 2014

**Gambar 2.** Konsentrasi Pb di Udara Ambien di Jakarta, Bandung, dan Serpong.

## Visi dan Misi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Upaya perbaikan tata ruang dan lingkungan hidup menjadi bagian dari upaya pada perbaikan menuju berdikari ekonomi, sebagaimana tertulis dalam Visi dan Misi Bapak Joko Widodo - Jusuf Kalla:

*Kami akan membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan melalui; (1) pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, (2) mengembangkan tata ruang wilayah yang terintegrasi antar level pemerintahan maupun darat - laut, (3) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem produksi nasional yang berkesinambungan, (4) edukasi konsumen untuk memahami dan mempraktekan gaya hidup yang ramah lingkungan, (5) mengeksploitasi SDA yang tidak terbarukan secara prudent (tidak merusak lingkungan). Pembangunan ekonomi yang lebih merata dan proporsional secara spasial di seluruh NKRI. Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai rata-rata 70 hingga 80. (6) Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio-eco-region dengan pola pembangunan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air. Penganangan program Indonesia Go Organic dengan pilot project 1.000 desa organik dari program reforma agraria sebagai sentra produksi penghasil pangan organik hingga tahun 2019, dan tambahan lagi 1.000 lagi hingga tahun 2024. Dan melakukan enforcement terhadap praktek pertanian lestari dengan percepatan implementasi Undang-undang No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya, (7) Role model sikap dan perilaku hidup yang merawat alam dan lingkungan sekitar melalui insentif dan disinsentif untuk mendorong perilaku hidup yang green dengan mendorong tercapainya 80 % rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.*

Poin-poin visi, misi dan program aksi tersebut sangat menyentuh akar permasalahan. Aspek tata ruang dan lingkungan hidup serta konservasi sumberdaya alam menjadi satu alur penyelesaian masalah yang tepat. Penataan ruang yang merupakan instrumen hulu dan konservasi sumberdaya alam pada bagian hilirnya akan menjadi penyelesaian masalah lingkungan hidup yang komprehensif.

Pola penyelesaian masalah yang demikian juga akan lebih efektif ketimbang secara parsial, yang kerap menimbulkan ego sektor dan disharmoni kebijakan.

## Upaya Perwujudan Program Aksi Tahun 2014 - 2019

Perwujudan perubahan tersebut penting dengan mengagendakan dalam program lima tahun ke depan dalam masa pemerintahan Bapak Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014 - 2019). Pelaksanaan program aksi ini perlu dilaksanakan secara kongkrit dengan prioritas pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Gaya kepemimpinan yang mengedepankan "action" dan melalui "keputusan cepat" akan sangat menentukan dalam mencapainya.

Dalam rangka mewujudkan "janji" kepada masyarakat ketika kampanye, maka visi dan misi Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu dielaborasi dengan program-program nyata dan disinergikan dengan program yang telah ada.

### a. Bidang Tata Ruang

Penataan ruang di Indonesia sudah memiliki landasan dan arah yang jelas. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya telah menggariskan penataan ruang dari tingkat nasional, kepulauan, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Dari aspek kebijakan publik yang tersedia, program penataan ruang sudah cukup lengkap. Implementasi kebijakan tata ruang ini menjadi hal yang lebih penting. Keteguhan dan konsistensi pengambil kebijakan dalam menjaga daerah-daerah lindung dan konservasi harus dipegang oleh setiap Kepala Daerah.

**Pertama**, hal yang diprioritaskan dalam penataan ruang ini adalah pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Upaya ini akan dapat menyelesaikan permasalahan ketidak-terjangkauan dan keterasingan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Permasalahan pembangunan di perbatasan dengan negara lain yang umumnya memiliki kesenjangan ekonomi, juga akan tersentuh dengan lebih optimal. **Program aksi** yang dilaksanakan dalam membangun ekonomi di daerah-daerah ini dapat diawali dengan penataan ruang yang berbasis produktivitas daerah. Produktivitas masyarakat perbatasan dapat ditingkatkan dengan pengembangan wirausaha produk unggulan berbasis kekayaan alam daerah, diantaranya hasil pertanian, hasil laut dan kerajinan. Dalam pertimbangan kedekatan jarak dengan negara tetangga, di daerah perbatasan ini sangat potensial untuk dikembangkan kota sentra pertanian (agropolitan), sehingga upaya-upaya ekspor hasil pertanian dan hasil laut menjadi lebih efisien. Di sisi lain, wilayah dengan hutan dan laut yang masih lestari perlu tetap dijaga sebagai modal karbon yang dapat dikompensasi dengan dana dari luar negeri melalui skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD Plus)*.

**Kedua**, bahwa konsep penataan ruang dengan mengoptimalkan sinergi antara pusat dan daerah serta darat dan laut, menjadi prioritas berikutnya. **Program aksi** dilakukan melalui optimalisasi tata ruang, terutama perlu diprioritaskan di wilayah DKI Jakarta, Ibu Kota Negara RI, sebagai *benchmark* daerah lain. Pengelolaan Jakarta dengan segala permasalahan ruangnya akan semakin efektif jika ada sinergitas perencanaan dengan daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. Sinergi penataan ruang darat dengan perairan laut juga akan sangat berarti dalam penyelesaian masalah air,

terutama banjir. Pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara, sangat perlu dukungan penataan ruang yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya. Demikian juga dengan pertumbuhan kota megapolitan lain di Indonesia, seperti halnya Surabaya dan Makassar. Dalam konteks antar kepulauan, sangat relevan dilakukan tata ruang laut sebagai basis pembangunan kelautan sebagai penyokong devisa dan potensi jalur transportasi tol laut antar pulau. Dengan demikian, penataan ruang tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi.

Kedua prioritas penataan ruang tersebut akan berpengaruh nyata dalam pengembangan sistem produksi nasional yang berkelanjutan. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan akan menjadi kawasan produktif dan pemasok devisa negara. Belum lagi jika melihat potensi pulau-pulau kecil dan laut sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh angin dan arus laut. Sebagaimana diketahui bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia sangat potensial untuk dibangun pembangkit listrik tenaga angin. Inovasi pembangkit listrik yang bersumber dari arus atau tekanan air laut juga sangat mungkin dikembangkan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dengan lebih baik.

Lingkungan hidup menjadi muara sekaligus barometer pembangunan. Pandangan bahwa sektor lingkungan hidup menjadi "pencuci piring pasca pesta" perlu diperbaiki, dengan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dari hulu sampai hilir. Penataan ruang sebagai pintu masuk pembangunan harus tertib dan memperhatikan daya dukung lingkungannya. Apabila kebijakan hulu penataan ruang tidak baik, maka pengelolaan lingkungan hidupnya tidak akan optimal. Sinergi penataan ruang dan lingkungan hidup serta konservasi sumberdaya alam menjadi keniscayaan.

## **b. Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam**

Mengacu pada visi dan misi Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam, maka perlu elaborasi dalam rencana aksi sebagai berikut.

**Pertama**, edukasi konsumen untuk memahami dan mempraktekan gaya hidup yang ramah lingkungan. Pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan atau pelatihan-pelatihan akan dapat menggiring perilaku konsumen untuk lebih bergaya hidup yang ramah lingkungan. **Program aksi** yang perlu dikembangkan adalah dengan pengurangan penggunaan kemasan plastik, pengalihan penggunaan barang-barang yang terbuat dari kayu, pemilihan produk-produk yang diproses dengan minim limbah sampai dengan pemilihan konsumsi pangan lokal yang alami atau organik.

**Kedua**, di bidang konservasi sumberdaya alam, bahwa kegiatan mengeksploitasi sumberdaya alam yang tidak terbarukan secara *prudent* (tidak merusak lingkungan). Pengelolaan sumberdaya alam yang baik diketahui dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Namun sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam dapat menjadi kutukan (*resource curse*), sehingga dapat menimbulkan masalah yang lebih besar bagi ekonomi bangsa. Pemanfaatan sumberdaya alam perlu dilakukan lebih hati-hati, dengan prinsip hemat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. **Program aksi** yang perlu dikembangkan adalah dengan sebisa mungkin meminimalisasi kegiatan eksploitasi sumberdaya alam tidak terbarukan tersebut, dengan cara mencari alternatif penggantinya. Berbagai kajian dan teknologi telah dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumberdaya alam tidak terbarukan tersebut dengan memanfaatkan potensi alam lainnya, diantaranya pengembangan biofuel,



bioethanol, energi surya, energi angin, energi arus laut, dan sebagainya. Namun demikian, di setiap kegiatan eksploitasi sumberdaya alam perlu diterapkan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan hidup, terutama Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Risiko Lingkungan dan penerapan kewajiban reklamasi pasca tambang yang lebih ketat.

**Ketiga**, terkait pembangunan ekonomi yang lebih merata dan proporsional secara spasial di seluruh NKRI. **Program aksi** pemerataan pembangunan dapat dikembangkan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa. Dalam konteks ini, Prof. Emil Salim menegaskan perlunya memprioritaskan pembangunan yang mengikuti pola huruf "U" terletak di kawasan timur Indonesia, dengan mencakup wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.<sup>3</sup>

**Keempat**, dalam rangka mendukung program Indonesia Sehat dan Pintar, maka penyediaan pangan yang sehat dan ramah lingkungan sangat penting. Program ini akan dapat mendekatkan Pemerintah kepada masyarakatnya (pro masyarakat), terutama petani. **Program aksi** yang perlu diprioritaskan adalah memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis *bio-eco-region*. Pendekatan ini sangat relevan, karena dengan basis wilayah kepulauan dan perekatan interaksi desa - kota akan menjadi pertimbangan utama. Ketersediaan dan dukungan komponen lingkungan hidup, terutama air dan lahan, termasuk unsur hara yang tersedia merupakan aspek daya dukung lingkungan yang perlu diperhatikan pula. Dalam konteks ini praktek pertanian yang hemat lahan dan air menjadi keniscayaan.

Pola pembangunan pertanian ramah lingkungan, atau dikenal juga dengan pertanian organik menjadi tuntutan dalam rangka menciptakan Indonesia Sehat. Praktek budidaya pertanian ini sudah dikenal dan dilaksanakan oleh berbagai komunitas petani di Indonesia. Di beberapa daerah, diantaranya Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Bogor, Bandung, dan Bali, sudah berkembang komunitas petani organik untuk komoditi beras, sayur, dan buah-buahan. Di level nasional kini juga sudah berkembang komunitas tani ramah lingkungan, komunitas organik Indonesia, penggiat vegetarian, dan bahkan telah berdiri berbagai lembaga tani dan koperasi.

Dalam rangka mengembangkan budidaya pertanian organik di Indonesia, perlu dikonstruksi program nasional. Sebagaimana penegasan Bapak Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam visi dan misi, bahwa akan dilaksanakan penancangan program *Indonesia Go Organic* dengan pilot project 1.000 desa organik dari program reforma agraria sebagai sentra produksi penghasil pangan organik hingga tahun 2019, dan tambahan sekitar 1.000 lagi hingga tahun 2024. Program ini cukup realistis, mengingat kini sesungguhnya masyarakat tani di Indonesia sudah mempraktekan budidaya pangan sehat dan ramah lingkungan. Para petani telah melakukan budidaya pertanian organik di berbagai daerah. Namun demikian, pada umumnya para petani terkendala dengan produk yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterlanjuran rusaknya sifat fisik dan kimia lahan pertanian akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan kesuburan terlebih dahulu. Di sisi lain, keberadaan pupuk organik belum dapat untuk memenuhi budidaya tani organik di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Tulisan tersebut terdapat dalam Buku *Renaissance Indonesia; Menyongsong Peradaban Lingkungan 2045*, terlampir.

Melihat potensi yang ada, usaha pembuatan pupuk organik dalam skala industri besar sangat memungkinkan, mengingat bahan baku berupa kotoran ternak, sampah domestik, bahan stimulan dan berbagai bakteri pengurai sangat tersedia di alam Indonesia. Untuk itu sangat perlu adanya intervensi dari Pemerintah dengan kebijakan pengadaan pupuk organik dan penanganan hasil panen.

Dalam rangka menegakan hukum terhadap praktek pertanian lestari, sehat dan ramah lingkungan diperlukan upaya percepatan implementasi Undang-undang No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya. Lahan pertanian sudah saatnya untuk dilindungi dan bahkan ditambah luasannya. Pemerintah perlu lebih banyak menetapkan sawah-sawah abadi, yang tidak boleh dikonversi menjadi daerah terbangun. Berbagai lahan tidur di seluruh wilayah Indonesia perlu dioptimalkan untuk dapat menghasilkan produk pangan lokal. Produksi pangan lokal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, dan semakin mendukung praktek tani yang ramah lingkungan.

**Kelima**, di dalam visi dan misi Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ditegaskan perlunya *role model* sikap dan perilaku hidup yang merawat alam dan lingkungan sekitar melalui insentif dan disinsentif untuk mendorong perilaku hidup yang *green* dengan mendorong tercapainya 80 % rumah tangga yang mengetahui perilaku peduli lingkungan hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. **Program aksi** *role model* ini dapat dikembangkan berbasis komunitas. Berdasarkan penelitian<sup>4</sup>, bahwa komunitas berpendidikan di perkotaan lebih mudah dikembangkan sebagai komunitas peduli lingkungan selain komunitas kampung, dan bisnis. Kepedulian lingkungan berbasis komunitas ini juga sangat potensial dilakukan di komunitas-komunitas agama. Pendekatan komunitas ini memerlukan strategi komunikasi dan pendidikan-pelatihan yang tepat. Dalam rangka mendorong komunitas-komunitas tersebut, akan lebih baik Pemerintah juga dapat memberikan insentif. Dalam upaya perbaikan lingkungan berbasis komunitas masyarakat, pembuatan *role model* ini menjadi keniscayaan dalam rangka membudayakan perilaku kolektif yang ramah lingkungan.

Pada akhirnya, menjadi ukuran membaiknya kualitas hidup adalah dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target dapat ditingkatkan mencapai 70 hingga 80. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia pada tahun 2014 baru pada kisaran 60, dengan mengacu pada parameter ketersediaan akses masyarakat pada air bersih, udara bersih, dan ketersediaan tutupan hijau. **Program aksi** untuk dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini perlu diawali dengan pembenahan sistem, melalui formulasi dan identifikasi parameter secara komprehensif. Detail dan integrasi parameter penunjang perlu dikembangkan terutama terkait dengan; sampah domestik, deforestasi hutan, pesisir laut, sampai dengan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Sebagai sebuah ukuran yang dapat menjadi barometer kualitas lingkungan hidup, maka pendekatan riset dan teknologi dalam meningkatkan IKLH nasional menjadi keniscayaan.

---

<sup>4</sup> Penelitian dilakukan oleh Penulis di Yogyakarta pada tahun 2008 - 2010, dan hasilnya dibukukan dalam buku Budaya Lingkungan; Akar Masalah dan Solusi Krisis Lingkungan, terlampir

## Pembenahan Program di Kementerian Lingkungan Hidup

Berkaitan program-program yang kini sedang berjalan (*existing*) di Kementerian Lingkungan Hidup, perlu beberapa langkah pembenahan sebagai berikut:

Pengelolaan lingkungan hidup perlu dikonkritkan. Program-program strategis yang umumnya menerapkan sistem insentif berupa penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkarya nyata untuk perbaikan lingkungan perlu di review ulang. Pendekatan insentif dan disinsentif, atau model *stick and carrot* perlu dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan keahlian/keterampilan dalam upaya yang lebih nyata dalam memperbaiki kualitas media lingkungan.

Program-program pengelolaan lingkungan hidup yang sekarang dikembangkan dengan sistem insentif, mulai dari penghargaan ADIPURA kepada kota bersih dan hijau, ADIWIYATA kepada sekolah berbudaya lingkungan, PROPER kepada industri yang taat peraturan lingkungan, dan KALPATARU untuk individu atau kelompok yang telah berkarya nyata dalam menjaga lingkungan, perlu ditingkatkan efektifitasnya. Semua program dengan pendekatan sistem insentif tersebut perlu dibuatkan acuan kriteria dan mekanisme yang lebih komprehensif dan kuat. Hal ini untuk menghindari kritikan dari masyarakat terkait dengan konsistensi dan kualitas penghargaan tersebut.

Untuk ke depan, pendekatan insentif (penghargaan) dapat dikembangkan oleh komunitasnya. Ciri masyarakat yang madani adalah dapat ikut serta membangun bangsanya, tanpa intervensi yang terlalu banyak dari Pemerintah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan oleh komunitas atau asosiasi lingkungan hidup. Contoh program yang mandiri dapat dilihat dari penghargaan aktor dan aktris terbaik film di Indonesia dan mancanegara yang diberikan oleh komunitas perfilman, dan sangat minim peran Pemerintah.

**Tabel 1.** Pembenahan Program di Kementerian Lingkungan Hidup

No	Program Existing	Pembaharuan	Keterangan
1.	<b>Adipura</b> (penghargaan kota bersih dan hijau)	Ditingkatkan efektifitasnya, dengan cara penguatan kriteria dan mekanismenya.	Penggabungan dan penyederhanaan program yang ada, sehingga lebih efisien. Sumber dana dapat dari CSR dan seminim mungkin dari APBN. Penyelenggara dan pemberi penghargaan adalah komunitas masyarakat/asosiasi di bidangnya, dalam upaya mendorong masyarakat madani dan mandiri.
2.	<b>Kalpataru</b> (penghargaan individu/kelompok masyarakat yang berkarya nyata untuk lingkungan hidup)		
3.	<b>Adiwiyata</b> (penghargaan sekolah SD - SMU peduli dan berbudaya lingkungan hidup)	Dapat disinergikan dalam program yang komprehensif dan terintegrasi, yaitu; <b>Tri</b>	
4.	<b>Proper</b> (Program Peringkat Kinerja Perusahaan)	<b>Harmoni Indonesia</b> ,	
5.	<b>Program Menuju Indonesia Hijau</b> (penghargaan kepada Kabupaten yang dapat	diberikan kepada Kepala Daerah yang dapat menerapkan	



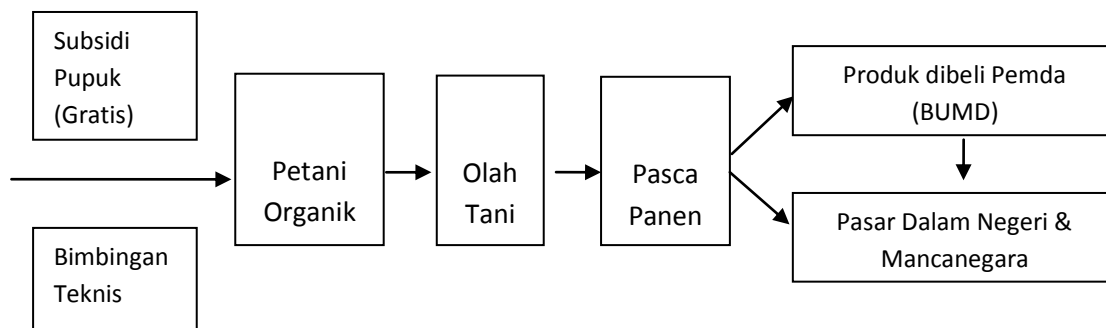
	menjaga tutupan hijau lahan)	keharmonian kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan hidupnya.	Integrasi program - program lingkungan dengan <i>outcome</i> yang sama dapat dilakukan dengan anggaran yang lebih efisien.
6.	<b>Program Eko-Pesantren</b> (Program pesantren berwawasan lingkungan hidup)		
7.	<b>Program pemberdayaan masyarakat</b>		
8.	<b>Program Corporate Social Responsibility</b>		
9.	Program parsial dan temporer		
10.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (masyarakat)	Program peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan pendidikan non formal maupun formal, terutama melalui pendidikan vokasional D1, D2, sampai dengan S2 atau S3 terapan.	Program insentif (pemberian penghargaan) dapat dialihkan menjadi program peningkatan kapasitas untuk masyarakat.  Program pendidikan vokasional keterampilan/ keahlian perlu segera ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM pengelola lingkungan di Pemerintahan dan dunia usaha, dalam rangka menyiapkan ASEAN Economic Community 2015. Sumber pendanaan terutama dari APBN sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

### c. Kartu Hijau (*Green Card*), sebagai Pendukung Program Indonesia Sehat

Dalam upaya pembudayaan lingkungan hidup, terutama melalui pangan yang sehat dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan perekonomian petani Indonesia, perlu diketengahkan program **Kartu Indonesia Hijau**. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan para petani untuk budidaya pangan sehat dan ramah lingkungan (secara organik), dengan kompensasi dan subsidi kepada para petani dan jaminan pasca panen. Keberhasilan program subsidi kepada para petani dapat

dilihat di Jepang, dimana Pemerintah sampai sekarang memberikan subsidi kepada para petani, termasuk para pemuda yang belajar pertanian di Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kegiatan usaha tani yang kini semakin ditinggalkan masyarakat karena kurang memberikan jaminan hidup.

Dalam implementasinya, para petani yang mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan mendapatkan Kartu Indonesia Hijau (*Green Card*), dengan kompensasi bantuan subsidi pupuk organik gratis dan pembelian produk organik dengan harga yang menguntungkan petani, disertai upaya pembinaan teknis yang terus menerus. Pemerintah Daerah, melalui BUMD didorong dapat membeli seluruh produk tersebut dan kemudian didistribusikan kepada pasar lokal maupun internasional. Untuk mendukung program ini dapat dibangun sentra-sentra tani organik dalam bentuk kota tani (agropolitan). Produk tani organik ini pada akhirnya dapat menjadi keunggulan kompetitif Bangsa Indonesia di era Asean Economic Community (AEC 2015), yang akan dimulai tahun 2015.



**Gambar 3.** Skema Subsidi dan Penanganan Pasca Panen kepada Petani Organik

#### d. Kelembagaan

Pemikiran bahwa pengelolaan lingkungan hidup hanya berada di hulu pembangunan perlu sedikit perubahan. Siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasi menjadi pekerjaan yang harus dilaksanakan secara utuh. Apalagi hal ini berimplikasi pada pemahaman bahwa institusi kementerian lingkungan hidup berperan merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan. Dalam ranah kebijakan publik, diketahui bahwa penyelenggaraan kebijakan menjadi tugas Pemerintah yang tidak dapat diganti oleh pihak lain. Fungsi kebijakan ini adalah mengatur seluruh masyarakat dan dalam implementasinya juga menjadi acuan kementerian (sektor) lainnya. Sehingga, fungsi kebijakan yang dirumuskan tidak berkaitan dengan level dan bentuk Kementerian. Dengan demikian, institusi Kementerian Lingkungan Hidup sesungguhnya tidak harus diposisikan dalam bentuk kementerian kluster/kelas ketiga, sebagaimana dikelompokkan di dalam Undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Substansi yang sangat kompleks, cakupan yang luas, dan perkembangan dinamika pengelolaan sampai dengan mancanegara dapat menjadi pertimbangan untuk menempatkan institusi kementerian lingkungan hidup dalam posisi yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini maka institusi kementerian yang membidangi fungsi dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan. Bahkan, Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup secara komprehensif telah mengintegrasikan aspek "*green issues*" konservasi sumberdaya alam dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan yang terkait penataan ruang dan konservasi sumberdaya alam sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Substansi "**tata ruang**" yang selama ini berada di Kementerian Pekerjaan Umum cukup berimpit dengan substansi "**tata lingkungan**" yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga upaya penggabungan dalam satu manajemen komprehensif lingkungan hidup akan lebih optimal. Demikian juga substansi "**konservasi sumberdaya alam**" yang kini belum memiliki pola kebijakan yang jelas, akan lebih tepat dibuatkan wadah di unit Kementerian Lingkungan Hidup. Fungsi konservasi sumberdaya alam di bidang kehutanan sudah cukup komprehensif ditangani oleh Kementerian Kehutanan, namun konservasi terkait dengan sumberdaya alam minyak bumi, batubara, dan berbagai mineral tambang lainnya belum memiliki kebijakan konservasi yang optimal. Penegasan cakupan dari "hulu" tata ruang sampai dengan "hilir" konservasi sumberdaya alam akan dapat mengoptimalkan peran, mengurangi tumpang tindih kebijakan (*overlap*) tanpa mengesampingkan sinergi dengan kementerian lain dalam menyelenggarakan pembangunan berwawasan lingkungan.

## Penutup

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi hijau yang melingkupi pemerataan tata ruang mulai dari daerah tertinggal, daerah pesisir, dan perbatasan berbasis produktivitas dan keunggulan kompetitif daerah.
2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia dilaksanakan dengan program nyata dan efektif serta dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama melalui; (1) integrasi tata ruang kawasan barat dan timur Indonesia, wilayah laut dan daratan, serta daerah perkotaan dan desa; (2) eksploitasi sumberdaya alam yang bijaksana dan berkelanjutan; (3) pengembangan gaya hidup konsumen ramah lingkungan; (4) pemberdayaan komunitas masyarakat peduli lingkungan, (5) pembangunan pengolahan limbah terpadu di sentra-sentra industri dan perkotaan; (6) pemberdayaan petani organik melalui subsidi, penyediaan pupuk, dan pengelolaan pasca panen, serta (7) efisiensi program pengelolaan lingkungan.
3. Penguatan kelembagaan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan aspek tata ruang dan atau konservasi sumberdaya alam.

## Tentang Penulis

Dr. Tasdiyanto Rohadi, SP, MSi. Kini sebagai Widyaiswara Madya di Kementerian Lingkungan Hidup. Tercatat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Papua pertama, Peneliti Alam dan Budaya di Nature & Culture Institute dan sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia/IALHI 2009-2014/2014-2019).